

ARTIKEL PENELITIAN
DANA SPP/DPP TAHUN ANGgaran 2001
KONTRAK NO. 71/LP-UA/SPP-DPP/K/V/2001

HUBUNGAN ANTARA STATUS PERKAWINAN PEREMPUAN
DENGAN TINGKAT PENGETAHUAN AKAN KESEHATAN
REPRODUKSI DI KALANGAN PEREMPUAN USIA SUBUR

OLEH:

DRA. DWIYANTI HANANDIN, MSI (KETUA)
WIDYA NAZINDA (MAHASISWA) (ANGGOTA)
DRS. WAHYU PRAMONO, MSI (PEMBIMBING)

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS ANDALAS
Dibiayai Oleh Dana SPP/DPP Tahun 2001
PADANG 2001

Abstrak

Sasaran kesehatan reproduksi kelompok tidak hanya terbatas untuk pasangan usia subur akan tetapi juga pada remaja atau pasangan tidak resmi. Permasalahannya sekarang adalah *sejauh mana tingkat pengetahuan perempuan usia subur akan kesehatan reproduksi?*

Penelitian ini berbentuk deskriptif analitis dengan menggambarkan tingkat pengetahuan akan kesehatan reproduksi perempuan usia subur. Populasi penelitian adalah perempuan usia subur baik yang sudah kawin maupun belum. Sampel diambil secara acak sederhana dengan besar sampel ditentukan sebesar 50 orang. Besar sampel diambil secara proporsional dengan perbandingan 25 perempuan usia subur yang sudah kawin dan 25 perempuan belum kawin. Data diambil dengan menggunakan kuesioner. Analisis data dilakukan dengan menggunakan table frekuensi dan table silang. Sedangkan lokasi penelitian di kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuanji, Kotamadya Padang.

Pengetahuan perempuan usia subur (PUS) secara umum terhadap gerakan keluarga berencana pada dasarnya sudah cukup memadai. Sedangkan pengetahuan responden terhadap tujuan keluarga berencana sebagai besar masih terbatas pada apa yang selama ini merupakan tujuan demografis yaitu mengurangi laju pertumbuhan penduduk, menjarangkan anak, mengatur jarak kelahiran, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Meskipun terdapat kecenderungan perempuan usia susbur yang sudah kawin cenderung lebih banyak tahu daripada PUS yang belum kawin. Sedangkan pengetahuan PUS terhadap kesehatan reproduksi dilihat dari perlindungan terhadap ibu yang sedang hamil, pengetahuan terhadap efek samping kontrasepsi, pemilihan kontrasepsi dan kepuasan terhadap metode kontrasepsi, perlindungan terhadap praktik reproduksi yang berbahaya secara umum juga sudah cukup memadai, meskipun ada kecenderungan perbedaan antara PUS yang sudah kawin dengan PUS yang belum kawin.

Pendahuluan

Keberhasilan Indonesia dalam program keluarga berencana telah nyak diakui oleh negara-negara lain maupun badan-badan dunia. melalui program yang telah dicanangkan sejak tahun 70 an, Indonesia lah dapat menurunkan angka pertumbuhan penduduk hingga encapai 2,34% per tahun. Dari segi jumlah peserta keluarga berencana, 57% dari 17 juta pasangan usia subur telah mengikuti program keluarga berencana. Sementara itu peserta keluarga berencana sendiri mencapai 30%. Pada tahun 2000 diharapkan peserta KB dapat encapai 60%-70%.

Mekipun dilihat dari capaian target kuantitatif, keluarga berencana dianggap berhasil akan tetapi banyak kritik dilontarkan terhadap keberhasilan tersebut. Penekanan terhadap target kuantitatif lah banyak dikritik karena mengakibatkan dilanggaranya hak-hak perempuan dalam pelaksanaan pencapaian target tersebut. Pemaksaan, ucaman secara halus merupakan cara-cara yang banyak dilaksanakan oleh petugas KB dalam pencapaian target tersebut.

Berbagai kritik terhadap pelaksanaan program keluarga berencana lah menyadarkan pemerintah untuk merubah strategi dalam upaya menurunkan pertumbuhan penduduk. Orientasi terhadap target pencapaian jumlah akseptor KB kemudian diubah menjadi penekanan ada partisipasi pada KB. Program KB yang mempunyai konotasi aksaan terhadap perempuan untuk mengikuti KB diubah menjadi gerakan yang ditetaskan pada kesadaran peserta mengikuti keluarga berencana. Melalui gerakan tersebut diharapkan keluarga berencana menjadi sebuah kebutuhan yang secara sadar diputuskan sendiri oleh masyarakat.

Perubahan strategi dalam pelaksanaan keluarga berencana tersebut juga memberi konsekuensi dalam melihat fungsi kontrasepsi dalam keluarga berencana. Kontrasepsi tidak lagi dipandang hanya sekedar alat untuk mencegah kehamilan saja melainkan juga sebagai alat untuk menjamin kesehatan reproduksi perempuan. Oleh karena itu asaran keluarga berencana tidak hanya melulu pasangan usia subur kan tetapi penduduk semua umur, apapun status perkawinannya.

1. Masalah Penelitian

Harapan pemerintah terhadap para PUS untuk mengikuti keluarga berencana sebanyak 60 sampai 70 persen pada tahun 2000 merupakan upaya untuk mengerem laju pertumbuhan penduduk Indonesia. Harapan tersebut akan mengalami kesulitan mengingat sejak mengenai keluarga berencana mengalami perubahan. Penekanan pada partisipasi peserta keluarga berencana membuat pemerintah harus hati-hati dalam melaksanakan gerakan tersebut. Layanan dan informasi terhadap peserta keluarga berencana harus menjadi prioritas utama untuk menggantikan cara-cara paksaan yang lama ini digunakan.

Gerakan keluarga berencana yang lebih menekankan akan pentingnya kesehatan reproduksi wanita telah dicanangkan semenjak tahun 1994 melalui Konferensi Kependudukan di Kairo. Di Indonesia butir-butir mengenai pentingnya kesehatan reproduksi dalam pelaksanaan keluarga berencana telah diatur dalam PP No. 21 tahun 1994 yang menjamin antara lain kebebasan pasangan suami istri dan akses terhadap pelayanan dan informasi (Wilopo, 1995).

Meskipun dalam kesehatan reproduksi kelompok sasaran tidak hanya terbatas untuk pasangan usia subur akan tetapi sampai sejauh ini program keluarga berencana di Indonesia membatasi pelayanan keluarga berencana pada pasangan resmi. Sementara itu masalah reproduksi di masyarakat terjadi juga pada remaja atau pasangan tidak resmi.

Kampanye mengenai kesehatan reproduksi dikalangan remaja atau pasangan tidak resmi relatif sangat sedikit. Hal ini akan menimbulkan masalah mengingat justru pada pasangan tersebut tingkat kerawanan terhadap berbagai penyakit seksual dan kesehatan reproduksi tinggi. Disamping itu tingkat hubungan seksual pra nikah dikalangan remaja mempunyai presentase yang tinggi (Sucipto dan Faturrochman, 1989) dan terdapat bukti tingginya kehamilan tidak dikehendaki di kalangan mereka (Khishiyah, 1995). Oleh karena itu untuk memenuhi target peserta keluarga berencana yang mandiri dengan penekanan pada partisipasi peserta haruslah diikuti dengan kesadaran akan pentingnya kesehatan reproduksi perempuan usia subur. Hal ini penting agar keberhasilan akan keluarga berencana tidak diikuti dengan timbulnya masalah-masalah baru di bidang kesehatan reproduksi. Permasalahannya sekarang adalah *sejauh mana tingkat pengetahuan perempuan usia subur akan kesehatan reproduksi?*

3. Tinjauan Pustaka

Kesehatan reproduksi sangat berhubungan erat dengan hak reproduksi wanita. Keduanya merupakan kondisi yang harus saling mengisi untuk melindungi wanita dari praktik-praktek keluarga berencana yang merugikan dan membahayakan wanita.

Menurut Smyth (1994) terdapat tiga tujuan utama pelaksanaan keluarga berencana di negara-negara selatan. pertama, tujuan demografis untuk mengatasi pertumbuhan penduduk, kedua, mempromosikan keselihan ibu dan anak untuk mencegah kematian maternal dan anak, dan ketiga menegakkan hak-hak asasi manusia (dalam Dwiyanto, dkk. 1996:189).

Selain ini program keluarga berencana lebih banyak menitik-beratkan pada pencapaian target yang pada dasarnya cenderung untuk menempatkan wanita sebagai obyek bagi pelaksanaan program tersebut. Hal ini akan membuat wanita tidak mempunyai kekuatan untuk menolak mengikuti keluarga berencana.

Pelaksanaan program keluarga berencana yang selalu dikaitkan dengan pelayanan birokrasi pemerintah kepada para akseptor, telah membuat para akseptor KB mau tidak mau terpaksa mengikuti program tersebut. Dengan demikian partisipasi peserta program KB lebih banyak

karena terpaksa tanpa adanya kesadaran akan pentingnya program tersebut bagi dirinya. Tekanan terhadap akseptor KB tersebut tidak hanya dalam hal partisipasinya dalam program KB tetapi juga dalam hal memilih alat kontrasepsinya. Hal ini sebenarnya bertentangan dengan UU. No. 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Kesejahteraan Keluarga. Kondisi tersebut sebenarnya tidak hanya dilakukan oleh pemerintah Indonesia saja karena menurut Kabeer (1994) Family Planning di banyak negara sedang berkembang pada umumnya didominasi oleh tekanan-tekanan (yang resmi) bagi kontrol penduduk daripada kebutuhan wanita akan pilihan reproduksinya (dalam Dwiyanto, dkk, 1996). Padahal wanita (dan pria) mungkin akan menemukan metode yang berbeda, yang cocok pada waktu berbeda pula (Sai dan Nassim, 1994).

Banyaknya kasus-kasus negatif yang menimpa wanita sebagai peserta KB telah membuat para pengambil keputusan untuk merubah program keluarga berencana menjadi sebuah gerakan. Sebagai sebuah gerakan, KB lebih menitikberatkan pada partisipasi para wanita ketimbang menempatkan wanita sebagai target. Konsekuensi dari perubahan strategi tersebut adalah pemerintah harus lebih memperhatikan kesehatan dan keselamatan wanita sebagai peserta KB.

Isu mengenai mengenai hak dan kesehatan reproduksi muncul karena adanya kecenderungan banyak negara yang mengembangkan dan mengimplementasikan keluarga berencana untuk tujuan menurunkan tingkat fertilitas dan pertumbuhan tanpa disertai dengan upaya untuk mempromosikan kesehatan dan kebebasan reproduksi wanita. (Smyth, 1994)

Hak reproduksi merupakan hak yang paling esensial dalam diri wanita. Walaupun secara anatomic wanita memiliki rahim yang berfungsi hanya apabila ada campur tangan unsur biologis pria, fungsi reproduksi bisa dapat terlaksana apabila wanita menginginkannya. Sejalan dengan hak reproduksi, wanita juga mempunyai hak atas kesehatan reproduksi, suatu kondisi kesehatan yang terkait dengan fungsi reproduksi yang dialami oleh wanita dalam seluruh tingkatan usia.

Kesehatan reproduksi didefinisikan sebagai situasi kesehatan yang lengkap (tidak sekedar terbebas dari penyakit atau kelemahan fisik) yang mencakup aspek fisik, mental, dan sosial yang ada hubungannya dengan bekerjanya fungsi-fungsi dari sistem reproduksi dan proses reproduksi (Family Care International, 1994:10). Hak-hak reproduksi didasarkan pada pengakuan akan hak-hak asasi semua pasangan dan pribadi untuk menentukan secara bebas dan bertanggungjawab mengenai jumlah anak, penjarakan anak, dan menentukan waktu kelahiran anak-anak mereka, dan mempunyai informasi dan cara untuk memperolehnya, serta hak untuk mencapai standar tertinggi kesehatan seksual dan reproduksi (Dwiyanto, dkk, 1996:186). Termasuk dalam elemen kesehatan reproduksi ini adalah kehamilan dan persalinan yang aman.

Kesehatan reproduksi mengandung sejumlah elemen yang secara garis besar dikelompokan kedalam dua hal, yaitu kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi sendiri. Termasuk kedalam pengertian kesehatan seksual adalah elemen-elemen sebagai berikut:

- a. Terhindar dari penyakit menular (PMS)

- b. Terhindar dari praktik dan kekerasan yang berbahaya
- c. Kontrol terhadap akses seksual (termasuk pelecehan seksual)
- d. Kepuasan seksual
- e. Dan informasi mengenai kepuasan seksual.

Elemen-elemen dari kesehatan reproduksi antara lain adalah:

- a. Perlindungan dan pengakhiran secara aman dan efektif kehamilan yang tidak dikehendaki
- b. Perlindungan dari praktik-praktik reproduksi yang berbahaya
- c. Pemilihan kontrasepsi dan kepuasan terhadap metode kontrasepsi
- d. Informasi terhadap kontrasepsi dan reproduksi
- e. Kehamilan dan persalinan yang aman
- f. Penanganan terhadap kemandulan (Dixon-Mueller, 1994)

Salah satu faktor penting yang harus ada agar tercapai situasi kesehatan reproduksi yang ideal adalah terlindungnya hak reproduksi individu. Hak reproduksi merupakan penjabaran dari hak-hak asasi manusia yang mencakup tiga hak dasar, yaitu:

- a. Hak dari pasangan atau individu untuk memutuskan secara bebas dan bertanggungjawab jumlah dan jarak anak, dan untuk mendapatkan informasi dan alat untuk itu;
- b. Hak untuk mencapai standar kesehatan seksual dan reproduksi; dan
- c. Hak untuk membuat keputusan yang bebas dari diskriminasi, paksaan, atau kekerasan (Family Care International, 1994:10).

Perubahan penekanan dalam keluarga berencana dari program menjadi gerakan bukan tidak menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan di lapangan. Imej bahwa keluarga berencana hanya diperuntukan bagi para wanita sudah menikah (pasangan usia subur) yang selama ini berlaku akan menyulitkan bagi para pelaksana di lapangan untuk memperkenalkan keluarga berencana sebagai sebuah gerakan untuk semua perempuan usia subur baik yang sudah menikah maupun belum. Disamping itu, keluarga berencana yang terlanjur di

Oleh karena itu diperlukan kampanye yang lebih gencar untuk merubah imej tersebut sehingga dapat meningkatkan kesadaran wanita akan hak dan kesehatan reproduksinya tersebut.

4. Metode Penelitian.

Penelitian berbentuk deskriptif analitis dengan menggambarkan tingkat pengetahuan akan kesehatan reproduksi perempuan usia subur. Disamping itu penelitian ini juga menganalisis hubungan latar belakang pendidikan, usia, dan status perkawinan dengan tingkat pengetahuan akan kesehatan reproduksi.

Populasi penelitian adalah perempuan usia subur baik yang sudah kawin maupun belum. Sampel diambil secara acak sederhana dengan besar sampel akan ditentukan sebesar 50 orang. Besar sampel diambil secara proporsional dengan perbandingan 25 perempuan usia subur yang sudah kawin dan 25 perempuan belum kawin.

Data diambil dengan menggunakan kuesioner. Analisis data dilakukan dengan menggunakan table frekuensi dan table silang untuk

mengetahui. Pengetahuan tingkat pengetahuan akan kesehatan reproduksi antara perempuan usia subur yang sudah bersuami dengan perempuan usia subur yang belum bersuami. Sedangkan lokasi penelitian di kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kotamadya Padang.

5. Hasil Penelitian dan Pembahasan

5.1. Gambaran Daerah Penelitian

Kelurahan Kuranji mempunyai luas daerah 900 ha dengan ketinggian tanah 10-15 meter diatas permukaan laut. Kelurahan Kuranji terdiri dari 10 RW dan 52 RT dengan batas di sebelah utara ke lurahan Gunung Sarik, di sebelah selatan kelurahan Pasar Ambacang, disebelah barat kelurahan Korong Gadang, dan di sebelah timur kelurahan Abi Bukit. Daerah ini terletak cukup jauh ke pusat kota. Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan 10 km. Sedangkan jarak dari ibu kota pemerintahan Kota Padang sejauh 15 km.

Jumlah penduduk kelurahan kuranji sebanyak 19155 orang yang terdiri dari 9337 laki-laki dan 9818 perempuan. Meskipun kelurahan Kuranji terletak jauh dari pusat kota akan tetapi dilihat dari jenis agama yang dianut mempunyai keragaman dimana 18980 beragama Islam dan 175 beraagama Kristen/Katolik. Tingkat pendidikan penduduk boleh dikatakan sangat beragam. Di kelurahan ini jumlah penduduk yang berpendidikan tinggi (Akademi dan Sarjana (S1-S3) boleh dikatakan cukup banyak (1107 orang) untuk tingkat kelurahan di daerah pinggiran. Hal ini karena di kelurahan tersebut terdapat perumahan yang banyak dihuni dosen-dosen atau karyawan Universitas andalas. Sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani (4732 orang) dan buruh tani (2287 orang) Sedangkan pegawai negri menempati urutan ketiga yaitu sebanyak 1344 orang. Penduduk lainnya bekerja sebagai ABRI, Wiraswasta, Swasta, Pertukangan atau Pensiunan.

5.2. Gambaran Responden

Sebagian besar responden (58%) berpendidikan menengah (SLTP dan SMU), hanya (8%) yang berpendidikan rendah (Tidak tamat SD dan tamat SD). Sedangkan yang berpendidikan Sarjana atau akademi sebanyak 34%. Meskipun kebanyakan responden berpendidikan sekolah menengah keatas akan tetapi hanya 24% yang bekerja, 76% lainnya tidak bekerja. Dari 24% responden yang bekerja tersebut jenis pekerjaan mereka adalah pegawai negri (41%), Pegawai Swasta (26%), dan Wiraswasta (33%).

Kebanyakan responden (76%) tidak mempunyai pendapatan sendiri. Mereka mengandalkan keuangannya dari suami atau orangtuanya, hanya (24%) yang mempunyai pendapatan sendiri. Responden yang bekerja sebagian besar (50%) berpendapatan dibawah Rp. 500.000, 41% berpendapatan Rp. 500.000 - Rp. 1.000.000, hanya 9% yang berpendapatan diatas Rp.1.000.000.

Meskipun dilihat dari status perkawinan responden 50% sudah kawin, akan tetapi hanya 32% dari jumlah responden yang ikut keluarga

berencana. Sedangkan responden yang mempunyai jumlah anak >3 sebanyak 28%, 20% mempunyai jumlah anak <3 dan 52% responden belum mempunyai anak.

5.3. Tingkat Pengetahuan Perempuan Usia Subur Terhadap Kesehatan Reproduksi.

Salah satu usaha pemerintah untuk menyebarluaskan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dilakukan melalui gerakan keluarga berencana. Melalui gerakan tersebut berbagai pengetahuan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi diperkenalkan. Meskipun 50% responden ada yang belum kawin akan tetapi sebagian besar (82%) responden tahu tujuan keluarga berencana, hanya 18% yang mengatakan tidak mengetahui tujuan keluarga. Hal ini memunjukkan bahwa keluarga berencana sudah menjadi pengetahuan umum yang tidak melulu dimiliki oleh perempuan yang sudah kawin saja. Meskipun demikian pengetahuan responden terhadap tujuan keluarga berencana sebagian besar masih terbatas pada apa yang selama ini merupakan tujuan demografis yaitu mengurangi laju pertumbuhan penduduk, menjarangkan anak, mengatur jarak kelahiran, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Hal-hal itulah yang selama ini lebih ditekankan pemerintah dalam mengkampanyekan keluarga berencana. Sedangkan hanya 30% responden yang mengetahui bahwa pada dasarnya tujuan dari keluarga berencana adalah juga untuk menjaga kesehatan ibu dan anak.

Meskipun sebagai sebuah gerakan, keluarga berencana sudah diperkenalkan cukup lama yaitu pada tahun 1994 akan tetapi sebagian besar (70%) responden kurang tahu akan perbedaan tujuan keluarga berencana sebagai program dan keluarga berencana sebagai gerakan. Hanya 30% responden yang mengetahui secara jelas perbedaan tersebut. Gambaran tersebut memberikan makna bahwa perubahan strategi untuk mendorong pasangan usia subur mengikuti keluarga berencana melalui suatu gerakan harus diikuti dengan strategi kampanye yang lebih tepat dan intens lagi. Gerakan keluarga berencana yang lebih menekankan pada partisipasi aktif para akseptor keluarga berencana harus diikuti dengan kerja keras para penyuluh lapangan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya keluarga berencana baik bagi pasangan yang sudah menikah maupun yang belum. Keluarga berencana tidak harus difahami sebagai program yang khusus hanya untuk pasangan yang sudah menikah akan tetapi juga bagi perempuan yang belum menikah. Hal ini nampaknya masih belum difahami oleh masyarakat. Sebagian besar (54%) kurang tahu bahwa keluarga berencana saat ini juga ditujukan juga bagi perempuan usia subur melalui program kesehatan reproduksi, hanya 30% responden yang mengatakan mengetahui sedangkan 16% responden lainnya tidak tahu sama sekali.

Perlindungan terhadap ibu yang sedang hamil merupakan salah satu hak yang tercakup dalam kesehatan reproduksi. Sebagian besar (62%) responden mengetahui bahwa wanita hamil berhak mendapatkan perlindungan, 10% mengatakan kurang tahu, dan 28% mengatakan tidak mengetahui. Bahkan untuk perempuan yang hamil di luar nikahpun, sebagian besar (38%) responden tahu bahwa mereka juga berhak

mendapatkan perlindungan, hanya 28% yang mengatakan tidak tahu, dan 34% responden mengatakan kurang tahu.

Meskipun sebagian besar responden mengetahui haknya untuk dilindungi selama hamil akan tetapi hak yang dituntut nampaknya masih dalam bentuk yang sederhana. Sebagian besar (66%) responden hanya menginginkan hak dalam bentuk lebih mendapatkan perhatian dari suaminya, 56% menginginkan hak untuk dibebaskan dari pekerjaan rumah tangga. Gambaran tersebut memperlihatkan akan adanya kesadaran perempuan bahwa kehamilan bukan hanya urusan perempuan saja, akan tetapi juga urusan suami atau lembaga tempat bekerja. Kesehatan kandungan tidak hanya menjadi tanggung jawab perempuan semata akan tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama suami. Sedangkan 45% responden mengatakan perlu cuti hamil bagi wanita yang sedang mengandung disamping itu 60% responden menginginkan pemeriksaan rutin kesehatan kandungannya.

Kesadaran akan haknya untuk mendapatkan perhatian yang lebih dari suami bagi wanita yang sedang hamil nampaknya juga ditunjang oleh pengetahuan terhadap perlindungan yang tinggi terhadap kehamilan yang membahayakan. Kelainan kehamilan yang mungkin terjadi sehingga membahayakan keselamatan ibu perlu diberitahukan kepada yang bersangkutan. Pengetahuan terhadap kehamilan yang membahayakan jiwa nampaknya sudah cukup memadai. Untuk itu pilihan yang ditempuh untuk menyelamatkan ibu dengan melakukan aborsi sudah menjadi wacana di kalangan masyarakat. Sebagian besar (38%) responden sudah mengetahui bahwa aborsi merupakan salah satu cara yang harus ditempuh oleh perempuan apabila kehamilannya membahayakan keselamatan jiwanya, 28% mengatakan tidak tahu, dan 34% mengatakan kurang tahu.

Disamping perlindungan terhadap kehamilan, perempuan berhak mendapatkan perlindungan terhadap praktik reproduksi yang berbahaya. Praktek-praktek reproduksi yang membahayakan kesehatan reproduksi perempuan antara lain dapat berupa penggunaan alat kontrasepsi yang tidak cocok dan kehamilan yang membahayakan jiwa. Meskipun sebagian besar responden telah mengetahui jenis-jenis alat kontrasepsi yang saat ini digunakan akan tetapi hanya 22% responden yang mengetahui efek samping dari alat-alat tersebut bagi kesehatan perempuan. Sebagian besar (56%) mengatakan tidak tahu efek samping alat kontrasepsi, dan 22% lainnya mengatakan tidak tahu. Rendahnya pengetahuan responden mengenai efek samping alat kontrasepsi tersebut nampaknya berkaitan dengan kurangnya para petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) menjelaskan kepada para akseptor. Bahkan para petugas lapangan KB cenderung untuk menyamarkan efek samping tersebut kepada para akseptor. Sebagian besar (54%) mengatakan tidak pernah dijelaskan mengenai efek samping alat kontrasepsi, hanya 24% responden yang mengatakan pernah, dan 28% responden mengatakan tidak tahu apakah PLKB pernah memberikan penjelasan mengenai efek samping alat kontrasepsi.

Kurang terbukanya para PLKB dalam menjelaskan efek samping alat kontrasepsi membuat pengetahuan responden mengenai hal tersebut menjadi rancu. Responden menganggap segala kelainan yang terjadi

sesudah menggunakan alat kontrasepsi difahami sebagai akibat dari alat tersebut. Oleh karena itu responden kurang dapat membedakan antara efek samping dengan gejala-gejala lain yang tidak ada kaitanya sama sekali dengan penggunaan alat kontrasepsi. Hal ini tentu saja akan menyebabkan terhambatnya gerakan keluarga berencana. Dan halikan masyarakat akan menjadi trauma menggunakan alat kontrasepsi akibat munculnya gejala negatif yang dirasakan, meskipun gejala yang muncul sebenarnya tidak ada kaitanya sama sekali dengan penggunaan alat tersebut.

Meskipun para responden kebanyakan kurang mendapat penjelasan mengenai efek samping penggunaan alat kontrasepsi, akan tetapi sebagian besar (68%) mengatakan berhak menolak menggunakan alat kontrasepsi. Hanya 22% responden yang mengatakan tidak tahu dan 10% mengatakan kurang tahu. Gambaran tersebut memberikan makna pada dasarnya responden sudah menyadari bahwa keikutsertaan dalam keluarga berencana adalah sukarela dalam pengertian mereka berhak diberi kebebasan untuk menentukan pilihan terhadap alat kontrasepsi apa yang akan digunakan. Sebagian besar (46%) responden faham bahwa mereka berhak untuk menolak alat kontrasepsi yang dipaksakan PLKB untuk digunakan, 20% mengatakan kurang tahu, dan 34% tidak tahu. Disamping kesadaran untuk memilih alat kontrasepsi yang cocok, sebagian besar (58%) responden juga mengetahui bahwa mereka berhak untuk menolak hamil bila membahayakan jiwanya. Hanya 28% yang mengatakan tidak tahu dan 14% mengatakan kurang tahu.

Pemilihan kontrasepsi dan kepuasan terhadap metode kontrasepsi merupakan bagian dari hak yang harus diterima oleh perempuan dalam kerangka menjaga kesehatan reproduksinya. Oleh karena itu semua perempuan baik yang belum kawin maupun yang sudah kawin, bahkan pasangan yang kawin secara tidak syah juga berhak mendapatkan pelayanan kontrasepsi yang menuaskannya. Wacana tersebut merupakan hal yang baru bagi masyarakat oleh karena itu tidak mengherankan apabila sebagian besar (38%) responden mengatakan tidak tahu, dan 42% mengatakan kurang tahu bahwa perempuan yang belum kawin juga berhak mendapatkan pelayanan kontrasepsi. Hanya 10% saja yang mengetahui hal tersebut. Hal ini dapat dimaklumi mengingat bahwa pemahaman masyarakat terhadap kontrasepsi selama ini hanya terbatas pada alat yang digunakan untuk keluarga berencana. Kontrasepsi difahami dalam arti yang sempit yaitu sebagai metode untuk mencegah kehamilan saja, oleh karena itu hanya berhak digunakan oleh pasangan suami istri yang syah saja. Dengan demikian perempuan yang belum kawin, pelacur tidak berhak mendapatkan pelayanan kontrasepsi.

5.4. Hubungan antara Status Perkawinan Perempuan Usia Subur dengan Tingkat Pengetahuan Akan Kesehatan Reproduksi.

Keluarga berencana sebagai suatu gerakan lebih menekankan pada partisipasi masyarakat secara sukarela. Disamping itu gerakan keluarga berencana tidak hanya difokuskan hanya pada pasangan usia subur yang sudah menikah akan tetapi kepada semua perempuan dan laki-laki usia subur. Oleh karena itu pengetahuan terhadap gerakan keluarga

Perlindungan terhadap PUS dalam kerangka untuk menjaga kesehatan reproduksi juga termasuk dalam hal efek samping dari alat kontrasepsi yang akan digunakan. Pengetahuan terhadap efek samping kontrasepsi yang digunakan harus diketahui oleh PUS agar mereka dapat menjaga kesehatan reproduksinya. Sebagian besar (44%) PUS kawin sudah mengetahui efek samping dari berbagai jenis kontrasepsi yang saat ini digunakan, sedangkan tidak ada satupun PUS tidak kawin yang tahu sebagian besar (80%) PUS tidak kawin tidak tahu efek samping kontrasepsi. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya efek samping alat kontrasepsi belum diungkapkan secara jelas kepada kalayak umum. Para petugas KB masih belum mau menjelaskan secara jelas mengenai hal tersebut sehingga tidak menjadi pengetahuan umum bagi masyarakat di luar peserta KB.

Meskipun ada kecenderungan perbedaan pengetahuan antara PUS kawin dan PUS tidak kawin dalam hal efek samping alat kontrasepsi akan tetapi dalam hal hak untuk menggunakan alat kontrasepsi yang aman sudah difahami olehnya. PUS tidak kawin

6. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Pengetahuan perempuan usia subur (PUS) secara umum terhadap gerakan keluarga berencana pada dasarnya sudah cukup memadai. Sedangkan pengetahuan responden terhadap tujuan keluarga berencana sebagian besar masih terbatas pada apa yang selama ini merupakan tujuan demografis yaitu mengurangi laju pertumbuhan penduduk, menjarangkan anak, mengatur jarak kelahiran, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Meskipun terdapat kecenderungan perempuan usia susbur yang sudah kawin cenderung lebih banyak tahu daripada PUS yang belum kawin.
- b. Sedangkan pengetahuan PUS terhadap kesehatan reproduksi dilihat dari Perlindungan terhadap ibu yang sedang hamil, Pengetahuan terhadap efek samping kontrasepsi, Pemilihan kontrasepsi dan kepuasan terhadap metode kontrasepsi, perlindungan terhadap praktik reproduksi yang berbahaya secara umum juga sudah cukup memadai, Meskipun ada kecenderungan perbedaan antara PUS yang sudah kawin dengan PUS yang belum kawin.

7. Ucapan Terima Kasih

Penelitian ini terlaksana berkat bantuan dari dana rutin Unand 2001. Untuk itu ucapan terima kasih dihaturkan kepada:

- a. Lembaga Penelitian Universitas Andalas yang telah memberikan bantuan dana tersebut kepada peneliti.
- b. Kolektor data dan para responden yang telah memberikan informasi demi kelancaran penelitian ini.

1. Daftar Pustaka

- Dixon-Mueller, Ruth. 1994. "The Sexuality Connection in Reproductive Health", dalam Towards Women-centered reproductive health: information package no 1. Kuala Lumpur: Asian-Pacific Resource an Research Center for Women (ARROW).
- Dwiyanto, Agus, dkk. 1996. *Penduduk dan Pembangunan*, Yogyakarta, Adtya Media.
- Family Care International. 1994. *Action for 21st Century Reproduction Healt & Rights for all: Summary report of Recommended Actions on Reproductive Health*. New York.
- Khisbiyah, Yayah, Desti Murdiyana, dan Wijayanto. 1995. *Konsekuensi Psikologis dan Sosio-Ekonomi yang Menyertai Kehamilan Tak Dikehendaki di Kalangan Remaja*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada.
- Sucipto, Helly P. dan Faturochman. 1989. *Pengetahuan, Sikap, dan Parktik Kesehatan Reproduksi Remaja*, Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada.
- Smyth, Ines. 1994. "Population Policies: Official responses to feminist critique" dalam *Touwords Women-centered reproductive health: information package no 1*. Kuala Lumpur: Asian-Pacific Resource an Research Center for Women (ARROW).
- "Tahun 2000 Akseptor KB 70 persen". Media Indonesia, 18-11-2001.
- Wilopo, Siswanto Agus. 1995. "Arah dan Implementasi Kebijaksanaan dan Program Keluarga berencana di Indonesia dalam kaitanya dengan hasil konferensi kependudukan Dunia 1994 di Kairo". Makalah dalam *Seminar Hak dan Kesehatan Reproduksi Implikasi Pasal 7 Rencana Tindakan Kairo Bagi Indonesia*, Yogyakarta, 1-2 Mei, Kerjasama Pusat Penelitian Kependudukan dengan Ford Foundation, dan PKBI.